

**KAJIAN PERISTIWA SEJARAH PERANG PUPUTAN
KLUNGKUNG
28 APRIL 1908**



OLEH :

1. PROF. A.A BAGUS WIRAWAN
2. DR. I NYOMAN SUKIADA, M.HUM
3. DR. IDA AYU WIRASMINI SIDEMEN, M.HUM
4. A.A.A DEWI GIRINDRA WARDANI, S.S, M.SI
5. FRANSISKA DEWI SETIOWATI SUNARYO, S.S, M.HUM.

DENPASAR, 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERANG	9
2.1 Faktor Politik	13
2.2 Faktor Sosial Ekonomi.....	18
2.3 Faktor Sosial Kultural.....	22
III. PROSES PEPERANGAN	25
3.1 Persiapan Perang.....	25
3.2 Meletusnya Perang.....	28
3.3 Akhir Peperangan dan Perjuangan Diplomasi	32
IV. NILAI-NILAI PERJUANGAN PERANG	35
4.1 Nilai Patriotik	36
4.2 Nilai Ksatriya (<i>Dharmaning Ksatriya Mahottama</i>)	44
4.3 Nilai-Nilai Bela Negara	45
V. PERSPEKTIF MASA KINI TERHADAP PERJUANGAN PUPUTAN KLUNGKUNG MELAWAN KOLONIALISME BELANDA	52
5.1 Perspektif Bela Negara Nasional Modern dalam NKRI	53
5.2 Perspektif Kesadaran Berbangsa	56
5.3 Perspektif Kesadaran Ideologi Bangsa Indonesia	61

VI. PENUTUP	68
6.1 Simpulan	68
6.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR INFORMAN	75
LAMPIRAN	77

BAB I PENDAHULUAN

Perjuangan rakyat Bali adalah perjuangan manusia yang menghuni spasial pulau Bali sejak mereka hadir di muka bumi sampai sekarang dan masa yang akan datang. Artinya mengikuti proses yang lama sejak masa hidup berpindah, berburu, dan pola menetap serta memelihara ternak yang sederhana sampai mencapai kehidupan modern. Perjuangan rakyat Bali sangat kompleks meliputi pelbagai aspek kehidupan. Apabila dalam skala makro, dikenal pula perjuangan bangsa Indonesia. Tonggak perjuangan bangsa Indonesia modern adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diucapkan oleh Ir. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia disingkat kemerdekaan sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia maka dapat dikatakan prosesnya lama dari periode ke periode. Ada tiga periode perjuangan bangsa Indonesia berdasarkan tonggak kemerdekaan, yaitu (1) perjuangan mencapai kemerdekaan sejak hadirnya manusia penghuni geografis Indonesia sampai menjadi bangsa Indonesia dan mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. (2) Perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau periode revolusi Indonesia, 1945 sampai 1950. (3) perjuangan mengisi kemerdekaan, 1950 sampai sekarang dan yang akan datang yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, sejahtera bahagia berdasarkan Pancasila. Periodisasi perjuangan bangsa Indonesia berskala makro digunakan untuk menjelaskan perjuangan rakyat Bali yang tergambar di diorama atau historama monumen perjuangan rakyat Bali.

Pada periode mencapai kemerdekaan, tercatat dalam sejarah bahwa raja-raja dan rakyat Bali ikut berjuang dengan dua cara yaitu cara perang dan cara diplomasi merespon kekuatan dan kekuasaan kolonialisme asing Belanda. Dengan reaksi yang dilancarkan oleh pimpinan dan pengikutnya yaitu raja bersama rakyatnya adalah dinamika yang mewarnai sejarah Indonesia atau sejarah perjuangan bangsa Indonesia di daerah-daerah. Selain respon dengan cara perang dan cara diplomasi masih dapat dibedakan lagi antara perjuangan rakyat yang tradisional kerajaan pra modern dengan perjuangan rakyat pergerakan nasional modern oleh pemuda terpelajar. Dua bentuk dan cara merespon ini menjadi ciri perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya.

Dua bentuk dan cara merespon kekuasaan kolonialisme ini pula dilancarkan oleh pimpinan dan pengikut perjuangan di Bali. Dalam sejarah Indonesia, periode mencapai kemerdekaan pra modern disebut periode perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dalam abad ke-18 dan ke-19. Demikian pula pemimpin dan pengikut dalam hal ini, raja-raja dan rakyatnya di kerajaan-kerajaan Bali ikut mengisi dinamika perjuangan pra modern menjadi benih perjuangan modern untuk mencapai kemerdekaan. Dua cara merespon kekuasaan kolonialisme Belanda di Bali dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan. Kerajaan-kerajaan yang diawali oleh kerajaan Buleleng dan Karangasem pada tahun 1846 dan 1849 termasuk Jembrana di dalamnya, dan Klungkung pada perang Kusamba tahun 1848 menempuh cara berperang. Kemudian pada decade pertama abad ke-20 cara perang ditempuh oleh raja-raja Badung, Tabanan,

dan Klungkung dalam peristiwa perang “puputan” Badung tahun 1906 dan puputan Klungkung 1908.

Pada akhir abad ke-19, dua kerajaan yaitu Karangasem dan Gianyar, raja-raja mereka merespon dengan cara diplomasi terhadap kekuasaan kolonialisme Belanda. Konsekwensinya dua institusi kerajaan tradisional hidup berdampingan bersama birokrasi institusi negara modern, pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada akhir abad ke-20 kerajaan Bangli dan rajanya ikut menganut cara diplomasi untuk menyelamatkan kekuasaannya menghadapi kekuasaan kolonialisme Belanda. Peristiwa penyerahan kekuasaan kerajaan Bangli ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah colonial Hindia Belanda sekaligus menandai seara “*defacto dan de yure*”, seluruh Bali menjadi bagian wilayah jajahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, penjajahan Belanda di pulau Bali dimulai pada tahun 1899, pasca dua peristiwa perang “puputan”, melawan kolonialisme Belanda.

Pulau Bali sejak akhir abad ke-17 sudah terbagi atas lima kerajaan yang berdaulat yaitu Karangasem, Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, dan Klungkung. Abad ke-18 muncul kerajaan Mengwi dan Gianyar dan awal abad ke-19 muncul kerajaan Payangan, sampai awal abad ke-19 tercatat di pulau Bali ada sepuluh kerajaan yang berdaulat. Sampai pertengahan abad ke-19, tersisa Sembilan karena kerajaan Payangan runtuh akibat perang dengan kerajaan Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Pada akhir abad ke-19 disusul keruntuhan kerajaan Mengwi yang berperang melawan kerajaan Badung dan Tabanan.

Sejak pertengahan abad ke-19, Bali memasuki periode perjuangan mencapai kemerdekaan memasuki perang melawan kolonialisme Belanda seperti yang dilakukan juga oleh raja, sultan di kalangan kesultanan di seluruh Hindia Belanda, dari Aceh sampai Maluku. Karakteristik perang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dalam sejarah telah ditulis oleh sejarawan T. Ibrahim Alfian, dalam karyanya yang berjudul *Perang di Jalan Allah : Perang Aceh 1873 – 1912*, terbit pada tahun 1987. Di dalam bukunya dijelaskan bahwa ada beberapa karakteristik perang yaitu ; perang besar, perang kecil, perang partisan, perang rakyat atau perang gerilya. Akan tetapi menurut sumber lokal yaitu *Hikayat Perang Sabil*, perlawanan rakyat Aceh terhadap tentara kolonial modern Belanda disebut Perang Sabil, Perang Belanda, Perang Kompeni, Perang Kafir (Alfian, 1987).

Pembagian nama dan bentuk perang yang terjadi diklasifikasi berdasarkan atas persepsi dan tempat perang itu terjadi. Oleh karena itu ada enam klasifikasi istilah perang yaitu : (1) perang yang terjadi atas dasar semangat atau ideology yang menggerakannya, contohnya : Perang Sabil, Perang Puputan ; (2) Perang yang terjadi atas dasar lokasi peristiwa perang berlangsung, contohnya Perang Afghanistan, Perang Teluk, Perang Buleleng, Perang Jagaraga, Perang Kusamba ; (3) Perang yang terjadi atas dasar penonjolan tokoh, contohnya Perang Diponegoro Perang Antasari ; (4) Perang yang terjadi atas dasar temporal lamanya peristiwa berlangsung, contohnya : Perang 30 Tahun, Perang 80 Tahun ; (5) perang yang terjadi atas dasar jenis senjata yang digunakan, contohnya : Perang Nuklir ; dan (6) perang terjadi atas dasar penonjolan

mereka yang menggerakkan perang itu, contohnya Perang Kurdi, Perang Padri (Clausetwitl dalam Alfian, 1987).

Karakteristik atau klasifikasi dalam konsep perang penting artinya selama periode kolonial di Indonesia. Perang- perang kolonial yang terjadi dari Aceh sampai Maluku selama periode kolonialisme Belanda di Indonesia. Perang Kolonial didasarkan atas visi colonial mendapat respon di kalangan sejarawan Indonesia yang mendalami masalah yang terkait dengan sejarah perang berdasarkan visi Indonesiasentris. Visi Indonesiasentris dalam historiografi perang lebih membuka pelbagai aspek dari perang itu sendiri. Aspek-aspek yang disoroti dan dijelaskan dari perang meliputi ideologi dan keyakinan para pelaku perang, latar belakang sosiokultural masyarakat, tipe-tipe kepemimpinan, dan lain-lain.

Semua aspek yang dijelaskan ditujukan untuk memperoleh gambaran realitas historis yang utuh dan berimbang berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda dan sumber-sumber pribumi (Abdullah, 1979). Keutuhan dan keberimbangan deskripsi perang sejalan dengan pendapat Clausewitt yang menyatakan bahwa historiografi perang tidak hanya dipandang dari perspektif politik semata, namun mengangkat pula aspek-aspek lainnya yaitu ekonomi, agama, dan kultural (Clausewitt dalam Abdullah, 1979).

Pertengahan abad ke-19 dan dasawarsa pertama abad ke-20 terjadi perang perlawanan antara raja Ida Dewa Agung bersama kawula kerajaannya melawan ekspedisi militer colonial Belanda. Dua perang perlawanan yang terjadi telah mengisi lembaran sejarah perang di kerajaan Klungkung. Dua bentuk perang perlawanan yang

mempunyai latar belakang penyebab yang berbeda juga ikut memberi ciri dinamika intern dalam masyarakat kerajaan.

Secara prosesusual, perang perlawanan pertama dikenal dengan nama Perang Kusamba 24-25 Mei 1849 (Wietle, 1859). Kemudian terjadi lagi perang perlawanan kedua dikenal dengan nama Puputan Klungkung 28 April 1908. Istilah "puputan" sebagai bentuk perang perlawanan ditemukan dalam sumber-sumber asing Belanda berupa telegram, catatan perjalanan, dan berita Koran sejaman (Jawa Bode, Maret sampai dengan Mei 1908).

Dua perang perlawanan terhadap ekspedisi militer pemerintah Hindia Beanda memberi isyarat bahwa masyarakat kerajaan Klungkung pada waktu itu memberikan reaksi tidak senang terhadap praktek politik kolonial Belanda. Lagi pula, sangat selektif merespon nilai-nilai asing yang dibawa oleh kolonialisme itu sendiri. Interaksi kekuasaan antara erajaan tradisional pribumi dengan kekuasaan modern asing Belanda di Klungkung cenderung menunjukkan dua gejala yang berbeda. Di satu pihak Nampak makin meluasnya kekuasaan Belanda di Hindia Belanda termasuk di kerajaan Klungkung. Di pihak lainnya nampak makin merosotnya kekuasaan tradisional Ida Dewa Agung di Kerajaan Klungkung.

Dari aspek politik, pengaruh Belanda makin menjadi kuat akibat intervensi secara intensif yang dilakukan oleh Belanda dalam persoalan intern kerajaan. Contoh partisipasi dan intervensi pihak Gubernemen dalam menentukan kebijakan politik kerajaan terutama suksesi dalam sistem birokrasi kerajaan, kecenderungannya para penguasa tradisional makin tergantung kepada kekuasaan Gubernemen. Akibatnya

kebebasan dalam menentukan soal-soal pemerintahan kerajaan makin memudar. Perjanjian tahun 1849, pasca perang Kusamba adalah bukti intervensi yang semakin intensif dilancarkan (ANRI, 1964). Bahkan pada tahun 1908, pasca perang puputan Klungkung, runtuhlah kekuasaan tradisional kerajaan Klungkung yang berdaulat. Sekaligus hasil penguasaan terakhir terhadap kerajaan yang melawan dengan cara perang dalam rangka praktek Pasifikasi politik colonial Belanda di Bali. Ditambah cara diplomasi yang ditempuh kerajaan Bangli pada tahun 1909 maka setelah itu seluruh kerajaan di Bali telah kehilangan kedaulatannya untuk mengurus pemerintahannya sendiri (Utrecht, 1962).

Dari aspek ekonomi, kontrak dengan pihak pemerintah Hindia Belanda (Gubernemen) dalam abad ke-19 mengakibatkan makin merosotnya status raja (Ida Dewa Agung), penghapusan hak tawan karang di Klungkung pada tanggal 24 Mei 1843 yang ditegaskan lagi pada perjanjian tahun 1849, pasca perang Kusamba, pengaturan jual-beli budak, dan intervensi pihak Gubernemen dalam pemasukan dan monopoli penjualan candu pada tanggal 19 Januari 1908 (ANRI, 1964) merupakan bukti keterlibatan pihak Guberemen ke dalam pranata-pranata ekonomi tradisional kerajaan Klungkung. Kondisi ini menimbulkan kegoncangan dan kekhawatiran. Bahkan muncul menjadi sikap menentang di kalangan pembesar kerajaan Klungkung terhadap intervensi pihak kekuasaan. Sikap keras menentang sering terwujud menjadi perlawanan bersenjata seperti Perang Kusamba dan Puputan Klungkung.

Dari aspek sosial budaya, makin meluasnya pengaruh kehidupan barat modern dalam lingkungan kehidupan tradisional kerajaan dan makin merosotnya status dan

kedudukan raja (Ida Dewa Agung). Penghapusan adat *Mesatia* di kerajaan Klungkung tahun 1904 merupakan bukti makin meluasnya intervensi nilai-nilai barat modern. Timbul kekhawatiran Ida Dewa Agung dan pembesar kerajaan Klungkung akan punahnya nilai-nilai kehidupan tradisonal kerajaan. Dalam konteks situasi seperti ini, ikatan tradisional dalam bentuk ketaatan terhadap junjungannya (*manunggaling kawula – gusti*) merupakan factor kuat bagi terlaksananya ajakan untuk menentang dan melawan sehingga perlawanan menjadi spontan.

Perang Kusamba tahun 1849 dan Puputan Klungkung 1908 ikut mengisi perjuangan rakyat Bali dan sebagai embrio yang masih pra modern untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang modern yang menjadi cita-cita perjuangan pemuda terpelajar melalui organisasi pergerakan yang dijiwai ideology nasionalisme modern. Bagaimana fenomena perjuangan perang dan mengapa pemimpin dan pengikut, raja (Ida Dewa Agung) dan rakyatnya bangkit merespon dan melawan demi kedaulatan kerajaan(nindihin gumi, membela negara) Ideologi Hinduisme menjadi keyakinan raja (Dewa Agung) dan rakyat pengikutnya tulus ikhlas (laskarnya) demi tegaknya dharma menghadapi kekuatan (dharma di bumi pertiwi Bali/dharma agama). Sisi-sisi inilah yang menjadi focus deskripsi tentang perjuangan perang melawan kolonialisme oleh rakyat Bali di Klungkung. Sekaligus menjadi embrio yang masih pra modern dalam proses perjuangan mencapai kemerdekaan di Bali.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERANG

Keberhasilan Belanda menaklukkan seluruh kerajaan di Bali, semakin mendukung kebijakan politik tentang Pax Neerlandica, tentang sebuah persekutuan jajahan wilayah Nusantara menjadi sebuah negara jajahan bernama Nederlands Indie. Traktat London tahun 1825, antara Inggris dan Belanda telah menetapkan Inggris keluar dari wilayah Nusantara dengan memperoleh bagian semenanjung Melaka. Dengan demikian Belanda dapat lebih memusatkan menerapkan kebijakan politiknya.

Kebijakan untuk Bali, tidak terpisah dari kebijakan Belanda untuk seluruh Hindia Belanda. Belanda menetapkan Buleleng sebagai pusat pemerintahan Belanda dengan dipimpin oleh seorang asisten residen berkedudukan di Singaraja. Aktivitas politik Belanda untuk kerajaan di Bali, dilakukan dari kantor asisten residen di Singaraja. Untuk menguatkan kekuasaan Belanda dan keutuhan terhadap wilayah Buleleng, dilakukan akte penyerahan wilayah oleh raja Bangli kepada Belanda di Buleleng, dalam bentuk *acte van afstand van Boeileleng* tertanggal 1 Januari 1854. (Arsip Nasional Republik Indonesia: 1964; 97).

Usaha Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai seluruh Bali, baik melalui jalan diplomasi maupun melalui tindakan militer, dapat dilihat lebih jelas ketika Pemerintah Hindia Belanda secara bertahap, meningkatkan status pejabatnya di Singaraja dan memperkuat Singaraja sebagai pusat pemerintahan sipil dan militer.

Dalam struktur pemerintahan, pemerintah Hindia Nederland di Batavia menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Sejak berakhirnya Perang Kusamba (1849), pada tahun 1855 Belanda menempatkan seorang *controleur* berkedudukan di Buleleng. (E. Utrecht: 1962; 217. Willard A. Hanna: 1976; 60. J. Paulus: 1917; 110. Lekkerkerker: 1920; XVII).

Penempatan seorang pejabat tinggi orang Belanda, yang disertai dengan pemilihan lokasi pusat pemerintahan, telah menunjukkan mulainya pengaruh sistem pemerintahan modern Belanda terhadap raja-raja Buleleng kemudian raja-raja Bali. Kantor *kontlir* di Singaraja akan menjadi titik sentral bagi raja-raja Bali yang masih merdeka untuk berkomunikasi. Hal ini terutama dilakukan oleh raja-raja Bali yang sejak awal sudah ingin menjalin perdamaian dengan Belanda melalui perjanjian-perjanjian. Sebaliknya, raja-raja yang memutuskan mempertahankan kemerdekaan politik dan wilayah, maka penempatan *controleur* di Singaraja harus dianggap sebagai pertanda tantangan Belanda yang akan menguasai Bali, baik secara diplomatik atau perang.

Perkembangan selanjutnya sejak tahun 1882, Bali dan Lombok ditetapkan menjadi sebuah karesidenan Bali Lombok, dibawah pemerintahan seorang residen berkedudukan di Singaraja. (tentang penetapan residensi Bali Lombok termuat *Staatblad van Nederlandsch-Indie No.194; Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsh-Indie van 4 Mei 1882 no. 2; Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie: 1883; 72. E. Utrecht:1962; 225-226; J. Paulus: 1917;110).*

Karesidenan Bali Lombok yang dipimpin oleh seorang *resident*, dibagi atas 3 *afdeeling*, yaitu *afdeeling* Buleleng, *afdeeling zuid Bali* (Bali Selatan), dan *afdeeling*

Lombok. Setiap *afdeeling* diperintah oleh seorang *assistent resident*. Setiap wilayah *afdeeling* dibagi menjadi *onderafdeeling*, yang dikepalai oleh *kontlir* (*controleur*). *Afdeeling* Buleleng dibagi menjadi dua *onderafdeeling*, yaitu Buleleng dengan ibu kota Singaraja dan Jemberana dengan ibu kotanya Negara. *Controleur* berkedudukan di ibu kota. *Controleur* Buleleng berkedudukan di Singaraja dan *controleur* Jemberana berkedudukan di Negara. (*Regeerings-Almanak*: 1924; 278-279). *Afdeeling* zuid Bali terbagi atas 5 *onderafdeeling*, yaitu (1) Badoeng dengan ibu kotanya Denpasar, (2) Tabanan dengan ibu kotanya Tabanan, (3) Gianjar dengan ibu kotanya Gianjar, (4) Kloengkoeng dengan ibu kotanya Kloengkoeng, dan (5) Karangasem dengan ibu kotanya Karangasem. (*Regeerings-Almanak*: 1924; 278-279). Untuk struktur pemerintahan penguasa pribumi, maka keturunan raja diberikan hak terhadap tahtanya sebagai raja di bawah kekuasaan Gupernemen Hindia Nederlands, dengan wilayah disebut sebagai *selfbestuur* dan rajanya disebut sebagai *bestuurder*. Setiap wilayah *onderafdeeling* yang dipimpin oleh *controleur* sama dengan *selfbestuur* yang dipimpin oleh raja pribumi dengan pangkat *bestuurder*. Dalam pemerintahan sehari-hari, *controleur* akan mengawasi pemerintahan seorang raja pribumi. Tahun 1855, ketika Belanda mengubah status *selfbestuur* menjadi *regentschap*, maka raja pribumi disebut dengan *regent*. Sistem pemerintahan disebut dengan *regentschappen*. (E. Utrecht: 1962; 218-219).

Wilayah *onderafdeeling* atau *selfbestuur*, terbagi menjadi *district* yang dipimpin oleh seorang punggawa dan pada umumnya dijabat oleh pejabat pribumi. Dalam hal memilih jabatan punggawa, untuk wilayah Buleleng, pemerintah Hindia Nederland

sudah mempertimbangkan berdasar atas kemampuan dan pengaruh kepada rakyat, dan tidak terlalu terikat dengan keturunan penguasa pribumi. Akan tetapi untuk Zuid Bali dan West Lombok, pemerintah Hindia Nederland di Singaraja, masih memperhatikan ada kaitannya dengan keturunan pejabat lama.

Mulai dari penguasa wilayah *district* (kepenggawaan), Belanda sudah mempercayakan kekuasaan itu kepada struktur pemerintahan pribumi dengan kepala pemerintahan yang dijabat oleh pejabat pribumi. Hanya wilayah *kemanaaan* yang dipimpin oleh seorang *manca* yang dihapuskan. Alasannya jelas sebuah efisiensi dalam pengangkatan pejabat pribumi yang berpengaruh kepada pembiayaan gaji.

Dalam stuktur pemerintahan tradisional, setelah kepenggawaan yang diperintah oleh seorang punggawa terdapat wilayah *kemanaaan* yang dipimpin oleh seorang *manca*. Ketika Belanda menghapuskan pembagian wilayah *kemanaaan* dan jabatan *manca*, maka di bawah punggawa yang memerintah sebuah distrik, langsung terdapat *perbekel* yang memerintah sebuah *desa*. Di bawah desa akan terdapat *banjar* yang dipimpin oleh seorang *keliyang*.

Untuk mengawasi dan mengendalikan pemerintahan Raja beserta pejabat pribumi bawahannya, Belanda mengangkat seorang *controleur* dan stafnya yang terdiri atas orang Belanda. Seringkali dalam keadaan sehari-hari, dalam kondisi damai, raja harus takluk kepada *controleur*. Akan tetapi dalam keadaan kerajaan gawat, misalnya ada gejala perlawanan dari rakyatnya, maka *controleur* menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Raja.

Wilayah kepunggawaan yang kemudian disebut dengan distrik jabatan sebagai punggawa tetap diberikan kepada keturunan punggawa pribumi. Walaupun harus terjadi pergantian, maka pejabat punggawa tetap diberikan kepada orang pribumi. Begitu pula jabatan di bawah *punggawa*, seperti *perbekel*, *keliyang dinas*, *pengrurah*, *sedahan* dan *sedahan agung*, semuanya dijabat oleh pejabat pribumi. Belanda telah menghapuskan wilayah *kemancaan* sehingga jabatan *manca* sebagai kepala kemancaan dengan sendirinya juga terhapus. Pemberian kuasa kepada pejabat pribumi, selain atas dasar prinsip efisiensi dalam biaya, juga keamanan bagi orang Belanda, apabila terjadi kerusuhan. Pejabat dari *punggawa* sampai dengan *perbekel* dan *keliyang*, merupakan pejabat yang bersentuhan langsung dengan rakyat pribumi.

Dalam kurun waktu setengah abad setelah berakhirnya perang Kusamba, kerajaan Klungkung terus berusaha memperkuat diri untuk menghadapi Belanda. Dengan kemenangan Belanda dalam puputan Badung, pihak Belanda berusaha untuk perang dengan Klungkung. Ada beberapa faktor yang memicu puputan Klungkung, yaitu faktor politik dan ekonomi.

2.1. Faktor Politik.

Ketika Kerajaan Buleleng berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, hampir semua kerajaan di Bali seperti Badung, Tabanan, Gianyar dan Klungkung, menandatangani kontrak penyerahan kerajaan kepada pemerintah Hindia Belanda tertanggal 13 Juli 1849. Isi kontrak antara lain: (1) menyerahkan kerajaan sebagai bagian wilayah Hindia Belanda, (2) bersedia membongkar semua benteng perang, (3)

bersedia menghapuskan hukum tawan karang, (4) membayar ongkos ganti rugi perang sebesar rata-rata 15%, (5) tidak boleh melakukan perampasan terhadap kapal yang kandas, dan (6) Belanda memberikan hak kebebasan kepada Raja untuk memerintah negeri yang sudah termasuk ke dalam Hindia Belanda. (Arsip Nasional Republik Indonesia: 1964; 13-29; 112-121; 153-160; 197-203; 219-226; 257-264).

Dengan kemenangan Belanda atas kerajaan Badung, Belanda melakukan kontrak dengan Klungkung tertanggal 1906 (E. Utrecht: 1962; 46), tertanggal 17 Oktober 1906 yang ingin menempatkan Klungkung dalam status *landschap* (swapraja), sehingga Klungkung sepenuhnya di bawah kolonial Belanda. Dalam perjanjian tersebut terdiri dari 31 pasal. Dalam pasal 3 bahwa selain memuat ketentuan yang tidak hanya menjalankan penuh hubungan kolonial antara swapraja Klungkung dan Gubernemen, tetapi juga bersifat fasitis yang melenyapkan demokrasi di wilayah swapraja. (E. Utrecht: 1962; 276).

Hubungan antara kerajaan-kerajaan di Bali, diwujudkan dalam kontak diplomasi berbentuk perjanjian antar kerajaan (*paswara asta negara*). *Paswara Asta Negara* adalah nama sebuah naskah yang memuat tentang beberapa perjanjian kesepakatan antar kerajaan-kerajaan di Bali, baik secara bilateral maupun multilateral. Isi perjanjian antara lain mengenai politik dan ekonomi. (Paswara Asta Negara. Nomor IIa.967). Ada dugaan isinya sama dengan yang telah dikerjakan oleh V.E. Korn dengan judul *Balische Overeenkomsten*. (V.E. Korn: 1922). Munculnya gagasan perjanjian antar kerajaan di Bali ini, dipelopori oleh Ratu penguasa Kerajaan Klungkung bernama Dewa Agung Istri Kanya, yang pada masa itu berperan sebagai wakil raja yang memerintah atas nama I

Dewa Agung Putra yang juga bernama Dewa Agung Gde Agung. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 1983; 102-107). Gagasan ini untuk mengisi masa detente setelah pernyataan menyerah kerajaan Klungkung terhadap laskar Belanda di bawah Van Swieten, yang dikuatkan dengan kontrak tertanggal 13 Juli 1849, antara Dewa Agung Putra raja Klungkung dengan Kapitein Adjudant T. Van Capellen. (Arsip Nasional Republik Indonesia;1964: 21-23).

Bagi kerajaan Klungkung, tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam hubungan bilateral dan multilateral yang dapat memperkecil konflik antar kerajaan, sehingga mempersempit celah bagi Hindia Nederland untuk melakukan politik adu domba. Dengan cara itu kerajaan-kerajaan di Bali diharapkan dapat mempersiapkan sebuah perlawanan dari sebuah kesatuan persekutuan antar kerajaan di Bali yang menyatakan diri anti kepada Belanda.

Perjanjian multilateral antar kerajaan-kerajaan di Bali yang ada dalam perjanjian tersebut di atas, terdiri atas I Dewa Agung Putra sebagai raja kerajaan Klungkung, dengan Ida Anake Agung Ida I Gusti Bagus Karangasem sebagai raja Karangasem, Ida Anake Agung Ida I Gusti Gde Ngurah merupakan raja di Singaraja, Ida I Dewa Manggis raja Gianyar, I Dewa Gde Tangkeban raja Bangli, Ida Tjokorda Gde Oka raja Payangan, dan I Gusti Ktut Besakih raja Mengwi. Dalam perjanjian disepakati tentang beberapa hal yang sangat peka menjadi bahan konflik dengan Belanda. Salah satu di antaranya adalah tentang *tawan karang* di laut (kandas di pantai karang) yang termasuk wilayah masing-masing kerajaan. Aturan tersebut dirinci secara detail, tentang

pengertian terdampar (*malayar kampih*), hak menawan dan hak penebusan (*Paswara Asta Negara*; 1b-9b).

Pelanggaran batas wilayah pada dasarnya berlaku dalam kasus melewati batas pekarangan rumah, atau batas wilayah desa antar kerajaan, termasuk batas garis pantai antar kerajaan. Istilah *taban karang* sama artinya dengan *tawan karang*, karena aksara 'b' dan 'w' dalam penyuratan Bali, memiliki arti yang sama. Dalam perjanjian antar kerajaan di Bali, ditetapkan hukum *tawan karang* dengan istilah *melayar kampih*. Apabila ada perahu kandas (*kampih*), maka penduduk desa nelayan yang berdekatan dengan lokasi perahu yang kandas itu, wajib memberikan bantuan penyelamatan nyawa terhadap penumpang kapal dan penyelamatan barang-barang. Setelah kapal itu dilaporkan, maka pemilik kapal harus menebus orang dan barang-barang yang telah diselamatkan. Apabila tidak bersedia menebus, maka awak atau penumpang kapal menjadi budak hak raja yang memiliki lokasi tempat kapal itu kandas dan barang-barang menjadi milik desa yang membantu menyelamatkan barang-barang itu. (*Paswara Asta Negara*: 2a-2b; V.E. Korn: 1922; 14-15).

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, istilah *kataban karang* itu lebih dikenal dengan istilah *tawan karang* yang diterjemahkan salah dengan kata *kliprecht*. *Klip* itu artinya karang, *rect* itu artinya hukum. (Arsip Nasional Republik Indonesia: 1964; 82). Bagi pemerintah Hindia Belanda istilah *karang* diterjemahkan bukan sebagai wilayah, tetapi sebagai batu karang yang sering menyebabkan perahu besar kandas. Dalam perjanjian antar kerajaan, *karang* artinya wilayah dengan batas-batasnya yang pasti, baik wilayah kerajaan atau wilayah desa atau pemukiman. Pemerintah Hindia

Belanda lebih memperhatikan pelanggaran di laut, tetapi jarang memperhatikan pelanggaran tapal batas di darat yang sering menyebabkan perang-perang kecil antar desa perbatasan yang berpengaruh atas perubahan tapal batas kerajaan pada desa-desa tepi batas kerajaan. Dalam bahasa Bali, perang-perang kecil disebut dengan *branangan*. Bagi pemerintah Hindia Belanda aturan tersebut dianggap sangat merugikan perdagangan pelayarannya, baik milik Belanda sendiri atau penduduk wilayah lain yang sudah berada di bawah kekuasaan Belanda. Penyelesaian kasusnya sering berakhir dengan perang.

Pada awal tahun 1906, di Bali terdapat tiga pembagian pemerintahan yaitu: (1), pemerintahan langsung (*rechtstreeks bestuur*) yang meliputi afedeling Buleleng, Jembrana dan Lombok; (2), Pemerintahan sendiri (*zelfbesturende*), yaitu Badung, Tabanan, Klungkung dan Bangli; (3), Wakil pemerintah Hindia Belanda (*stedehouder*), Gianyar dan Karangasem. Pada tahun 1909, Bangli menjadi *stedehouder*. (G.F. de Bruyn Kops: 1909;13-14). Dengan berlakunya pemerintahan sendiri (*zelfbesturende*) bagi seluruh kerajaan di Bali, maka susunan pemerintahan kerajaan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Struktur pemerintahan tetap mengikuti struktur birokrasi tradisional. Akan tetapi residen berperan untuk pengangkatan dan pemberhentian raja. Raja yang diangkat masih ada keturunan raja (patrilinial). (A.A. Gde Putra Agung: 2009; 233). Perbatasan antar kerajaan, menjadi salah satu permasalahan politik antar kerajaan-kerajaan di Bali

2.2. Faktor Sosial Ekonomi.

Pendapatan bagi kerajaan Klungkung diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan tanah milik kerajaan, pajak sawah yang dipungut setiap tahun (*tigasana*), bea cukai barang-barang ekspor maupun impor yang keluar masuk pelabuhan, bea cukai pelabuhan dan hasil dari tawan karang. (H.H Koll: 1914; 281. J.J. de.Hollander: 1898; 696).

Selain kepentingan politik, juga ada kepentingan ekonomi yang diatur dalam perjanjian bilateral. Dalam tahun 1872 (tahun saka 1794), dilakukan perjanjian antara kerajaan Karangasem dengan kerajaan Klungkung yang mengatur tentang barang-barang yang boleh keluar masuk pada masing-masing pelabuhan kerajaan. Hal menyolok adalah barang dagangan yang disebut dengan dengan opium. (*Paswara Asta Negara*; 18b-19b).

Candu sudah diperdagangkan secara terbuka di Bali sebelum Hindia Belanda menguasai seluruh wilayah Bali. Dalam *Paswara Asta Negara*, pada bagian perjanjian perdagangan antara kerajaan Karangasem dengan kerajaan Klungkung tahun 1872 (1794 saka), disebutkan *apiyun* (candu) sebagai salah satu materi dagang yang diperjanjikan. Bagi kerajaan-kerajaan di Bali, perdagangan candu tampaknya memberikan pemasukan besar yang berasal dari hak monopoli perdagangan candu yang diberikan kepada *subandar* orang Tionghoa. Ketika pemerintah Hindia Belanda berhasil menduduki sebagian wilayah Bali, pemerintah Hindia Belanda mulai melihat bahwa di Bali perdagangan candu memberikan keuntungan. Pemerintah Hindia Belanda berusaha

memiliki hak monopoli perdagangan candu dan mendapat perlawanan raja-raja Bali dalam bentuk perang terbuka bersenjata.

Candu yang tiba di Bali berasal dari India, masuk melalui Singapura dan tiba di pabean Buleleng. Candu dibawa masuk ke Bali oleh para pedagang Mandar, Bugis. Untuk menyembunyikan transaksi dagang, para pedagang itu menukarkan candu dengan hasil produksi dari Bali yang bernilai ekspor. Dari Bali pedagang Cina menjual secara gelap candu itu ke Jawa, Borneo, dan Celebes. (Willard A Hanna:1976; 98). Candu sebagai barang dagangan di jual di Bali.(Ide Anak Agung Gde Agung:1989; 18). Candu yang masuk ke Bali melalui pabean Buleleng, berstatus perdagangan gelap atau penyelundupan candu (candu gelap). Namun tetap dikenakan pajak impor, karena pajaknya besar dan merupakan pendapatan tertinggi dari raja sebagai penguasa lokal dan *ambtenar* Belanda. Pajak candu sering dibayarkan dalam bentuk bayar di depan (*verpacht*), sehingga jumlah pemasukannya tidak terkontrol. (P.L. Van Bloemen Waanders: 1859; 84. Willard A Hanna: 1976; 98).

Oleh karena candu berstatus perdagangan gelap dan memberikan keuntungan besar, telah menciptakan peluang terjadinya penyelundupan candu yang dianggap tidak merugikan pajak impor. Pada tulisan Bloemen Wanders, diberikan satu contoh tentang kasus penyelundupan candu. Bahwa para pedagang Bugis dan Mandar, dalam pertengahan tahun 1850, berhasil memasukkan candu gelap sebanyak 300 peti. Setiap satu bol (bongkah/*bungkul*) candu dikenakan pajak impor sebesar 500 uang kepeng. Satu peti isinya 40 bol (bongkah/*bungkul*). 300 peti isinya 10.000 (bongkah/*bungkul*), sehingga harus membayar pajak sebesar 6.000.000 uang kepeng, sama dengan 6.000

kantung, atau sama dengan f 15.000. (P.L. Van Bloemen Waanders: 1859; 83-8). Total impor berjumlah 300 peti atau 12.000 (bongkah/*bungkul*), sehingga cukai impor seluruhnya berjumlah 6.000.000 uang kepeng. Apabila pajak dari candu itu rata-rata sama sebesar kasus yang disebutkan oleh Bloemen Wanders, maka besarnya pajak yang masuk ke kas kerajaan dari perdagangan candu. Kondisi ini menyebabkan perdagangan candu sebagai sumber pajak terbesar bagi kerajaan.

Pasca ekspedisi militer di Badung dan Tabanan, pemerintah kolonial mengatur penjualan candu di Bali, yang hanya dilakukan oleh pedagang-pedagang yang ditunjuk oleh pemerintah. Mulai 1 April 1908, seluruh penjualan candu di Bali dimonopoli oleh kolonial. Berkaitan dengan hal tersebut, kolonial membuka 120 kantor penjualan candu yang dikepalai oleh petugas yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Perkembangan ini menimbulkan tantangan di Klungkung. Tanggal 16 April 1908, terjadi penyerangan kantor penjualan candu di Gelgel yang dipimpin oleh Cokorda Gelgel. Pasukan Belanda mengadakan patroli dan melakukan serangan balik ke Gelgel. Berlangsung pertempuran selama dua hari yaitu dari tanggal 16 April sampai dengan 17 April 1908. (I Wayan Ardika, dkk: 2013; 430-437). Pembakaran gudang candu di desa Gelgel, pemantik Puputan Klungkung yang meletus pada tanggal 28 April 1908. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 1983; 133).

Berkaitan dengan ekonomi, pemerintah kolonial Belanda melakukan perjanjian untuk mengambil alih sumber penghasilan kerajaan Klungkung, tertanggal 17 Oktober 1906. Dari perjanjian tersebut mengharuskan raja Klungkung dan pejabat kerajaan untuk menyerahkan hasil bea cukai dan keuntungan monopoli candu kepada Belanda.

Perjanjian tersebut dipertegas lagi dengan perjanjian tambahan tertanggal 18 Januari 1908 yang terdiri dari 6 pasal.(Arsip Nasional Republik Indonesia;1964: 69-73). Isi kontrak antara lain :

- a. Menyerahkan segala kekuasaan memungut bea cukai atas barang-barang masuk dan keluar kerajaan Klungkung.
- b. Menyerahkan kekuasaan memungut bea labuh batu. Bea labuh batu adalah salah satu jenis pajak pelabuhan.
- c. Menyerahkan hak pak apium (menarik pajak dan penjualan candu).

Orang Tionghoa sebagai penyewa kontrak pelabuhan dengan jabatan syahbandar (*subandar*) (C. Lekkerkerker: 1923;156-157). Kekuasaan seorang syahbandar pelabuhan sebagai pengontrak, mendapatkan hak antara lain: (1) menertibkan bersandarnya kapal yang keluar masuk pelabuhan; (2) bertugas memungut pajak berlabuh bagi kapal-kapal yang masuk pelabuhan; (3) memungut cukai ekspor impor terhadap transaksi barang bongkar muat yang dilakukan di pelabuhan; (4) memeriksa surat-surat kapal yang masuk berlabuh; (5) menertibkan perdagangan antar kerajaan dan dengan orang asing. Perdagangan melalui pelabuhan diketahui oleh syahbandar (Lihat E. Utrecht: 1962; 119; *Kolonial Tijdschrift*: 1923; 156; Cf. A.A. Gde Putra Agung (dkk): 1984; 18-19).

Seorang syahbandar Tionghoa yaitu Jap Sin Liat sebagai syahbandar pelabuhan di Karangasem, yang masih memiliki hak kontrak monopoli penjualan candu di kerajaan Klungkung, dipaksa oleh Belanda untuk membatalkan haknya. Akhirnya Jap Sin Liat bersekutu dengan Cokorda Gelgel untuk mengadakan perlawanan dengan

Belanda. (Soerabaiasch Nieuwsblad: 1908). Mengenai pak apium yaitu monopoli penjualan candu yang sangat merugikan kerajaan Klungkung dan orang Tionghoa sebagai penyewa pengontrak pelabuhan.

Perjanjian tersebut dengan tegas Belanda mengambil alih semua sektor penghasilan kerajaan Klungkung. Bagi kerajaan Klungkung berarti pengurangan pemasukan kas kerajaan dan pengekangan berniaga. Punggawa Gelgel yaitu Cokorda Gelgel bersama-sama putra mahkota Swecapura sangat menentang kedua perjanjian baik perjanjian tertanggal 17 Oktober 1906 maupun 19 Januari 1908. Dengan tegas bertekad melawan Belanda dan siap berperang.

2.3. Faktor Sosial Kultural.

Sesungguhnya tidak ada faktor sosial kultural sebagai penyebab atau faktor puputan Klungkung, karena Belanda hampir tidak pernah menyentuh masalah sosial budaya dalam masa kontrak, baik dengan kerajaan Klungkung maupun dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Bali. Akan tetapi Belanda ikut campur dalam bidang sosial budaya, hanya terbatas pada hal-hal yang dari sudut pandang Belanda dianggap di luar batas kemanusiaan. Seperti contoh perjanjian antara kerajaan-kerajaan di Bali dengan Belanda tertanggal 23 September 1904, yaitu tentang masalah *mesatia*. (Arsip Nasional Republik Indonesia; 1964: 42-45). Isi perjanjian, antara lain sebagai berikut:

Isi alenia ketiga:

Inggih sahantukan pakajunan Ida Sri Gupremen, preside ngusanang indik salwiring krama masatya satyaan padem, ring djagat wawengkan Klungkung,

rawuh ring djagat para agung-agung Bali sami, punika awanan wenten kapasobajahang, antuk sang kalih mungguwing adjeng, sekadi inutjap ring sor puniki.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Ya, karena keinginan Ida Sri Gubernemen tentang prihal agar menghentikan rakyat yang melakukan satiya mati, di dalam wilayah kerajaan Klungkung, sampai kepada di wilayah kerajaan raja-raja Bali semuanya, itu sebagai sebab adanya perjanjian, yang diperjanjikan oleh beliau berdua yang tersebut di depan, yang isinya sebagai berikut ini,

Isi alenia keempat:

Ida Idewa Agung, Susuhunan ring Klungkung, masobaja tiba ring ragan ida, mekadi ring sapranan tika turun-turunan ida, ngusanayang salwiring solah krama mesatya-satyaan padem, ring jagat Klungkung, sakuhubannja.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Ida Idewa Agung, raja di Klungkung, berjanji atas nama dirinya sendiri, dan sampai kepada para keturunannya, menghentikan semua pelaksanaan rakyat melakukan satya sampai mati, di kerajaan Klungkung dan wilayah kekuasaannya.

Isi alenia keempat:

Padagingan, Ida Idewa Agung tan wenten pisan ngenakang, ngitjenin malih, wawalun Idewa Agung, jadyapin wawalun sasemetonan ida, jadyapin wawalun isapasira ugi, kabasmi sareng ring sawan lanangnja. Tjendeke, Ida Idewa Agung, tan wenten pisan, ngenakang nglugrahang malih, djanma isapasira ugi, padem njatyain sawan isapasira djwa.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: *MAORI*

Singkatnya, Ida Idewa Agung, sama sekali tidak mengizinkan lagi, janda I Dewa Agung, walaupun itu janda masih saudara, dan janda siapa saja, dibakar bersama-sama jenazah suaminya. Singkatnya Ida Idewa Agung, sama sekali tidak mengizinkan lagi, manusia siapa saja, (harus ikut) mati karena melakukan satya terhadap jenazah siapa saja.

Pihak Klungkung diwakili oleh Dewa Agung Putra (raja), Dewa Agung Gde Smrabawa (bupati), Pedanda Ktut Pidada (*bagawanta*), Cokorda Mayun (*bahudanda*). Pihak Belanda oleh residen Bali Lombok yaitu Johannes Eschbach dan kontrolir Schwarts. Belanda minta kepada Dewa Agung, agar menghentikan adat mesatia karena dianggap diluar kemanusiaan.

BAB III

PROSES PEPERANGAN

3.1. Persiapan Perang

Hubungan antara pemimpin dengan pengikut dalam perang melawan kolonialisme Belanda. Sebagai pimpinan tertinggi adalah raja, sebagai kepala pemerintahan kerajaan yang sepenuhnya bertanggungjawab menyelamatkan kerajaan. Jika terjadi peperangan, maka raja memanggil seluruh rakyat yang dapat bertempur dan angkat senjata untuk mempertahankan kerajaan. Semua golongan masyarakat harus ikut berperang. (J.J. de. Hollander: 1898; 711-715).

Raja dapat menunjuk panglima perang yang terlibat langsung dalam perang, seperti strategi, tehnik, taktik dan logistik. Jabatan ini biasanya dipegang oleh para manca agung, seperti bupati atau punggawa yang memiliki keahlian militer. Para pendeta kerajaan dipercayakan oleh raja untuk memegang pimpinan dalam peperangan.(Wipra Nguraha. *Gaguritan Bhuwana Winasa*). Pada umumnya para pendeta dan brahmana diberi tugas sebagai utusan dalam masa perang atau damai. (J.J. de. Hollander: 1898; 715).

Dalam organisasi kelaskaran Bali, terbagi dalam kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok memiliki tugas. Kelompok pertama disebut pematang, yaitu prajurit pilihan yang bertempur di garis depan, memiliki peran penting dalam pertempuran, mahir dalam perang dan teknik persenjataan. Kelompok kedua yaitu telik tanem, merupakan laskar yang bertugas sebagai spionase untuk mengetahui kekuatan

musuh baik dari jumlah laskar, persentajaan dan logistik. Laskar ini memberikan petunjuk kedudukan musuh. Ketika pasukan Belanda berhasil mendarat di Kusamba, *telik tanem* Klungkung menyebarkan berita bahwa raja Klungkung kepada raja-raja Bali Lombok agar berontak ketika Belanda menyerang Klungkung. Kelompok ketiga disebut *pecalang*, merupakan laskar bhayangkara istana yang bertugas melindungi dan mempertahankan istana dari serangan musuh. Kelompok keempat adalah laskar rakyat (*endehan*), yang terdiri dari penduduk laki-laki yang sudah siap memanggul senjata. Laskar ini setiap saat dikerahkan jika dibutuhkan. Dalam perang, laskar ini memiliki tugas pokok yaitu menjaga desa-desa perbatasan dari serangan musuh. (Ida Bagus Sidemen: 1984; 126-127)

Dalam perang puputan Klungkung, raja Klungkung Dewa Agung Putra (Dewa Agung Jambe) sebagai pimpinan tertinggi laskar kerajaan. Raja mengangkat panglima perang yaitu Cokorda Gelgel (bupati); Dewa Agung Gde Semarabawa (bupati wakil raja); Dewa Agung Rai (bupati Satria); Cokorda Gde Oka (punggawa Banjarangkan). Para panglima dibantu oleh para pimpinan *sikep* (laskar) yang terdiri dari para pemekel. (Wipra Nguraha. *Gaguritan Bhuwana Winasa*). Laskar secara keseluruhan disebut *sikep*.

Persiapan menghadapi perang terbuka melawan Belanda segera diatur. Satria sebagai benteng pertahanan sebelah timur, di bawah pimpinan Dewa Agung Rai, yang diperkuat oleh ratusan laskar yang bersenjatakan tombak, bedil dan beberapa buah meriam. Benteng sebelah timur bertugas menghadang serangan Belanda dari Karangasem, yang bergerak dari desa Lebu dan yang bergerak dari desa Kusamba.

Benteng sebelah selatan yang membentang sepanjang garis perbatasan dengan Gelgel, dipusatkan di desa Kamasan, Jelantik dan Galiran. Benteng ini dipimpin oleh Cokorda Gelgel dan Dewa Agung Gde Semarabawa. Laskar ini dilengkapi dengan 200 pucuk bedil dan 2 buah meriam. Laskar ini selain harus mampu membendung serangan Belanda, namun juga harus mampu melakukan serangan balasan. Dengan demikian benteng selatan menjadi titik pertahanan Klungkung dalam menghadapi serangan pasukan Belanda yang bergerak dari Kusamba, Jumpai, Satria dan pasukan Belanda yang bergerak dari pantai Lebih Gianyar. Benteng bagian barat dipusatkan di desa Banjarangkan dan dibawah pimpinan Cokorda Gde Oka dan Cokorda Gde Raka. Benteng ini dipertahankan oleh laskar gabungan dari desa-desa Banjarangkan, Bakas, Tusan, Nyalian dan Tohpati. Laskar ini dilengkapi senjata tombak panjang atau pendek dan keris. Benteng bagian barat membendung serangan Belanda di Gianyar yang bergerak dari Tulikup, dengan mempertahankan jembatan sungai Melangit yang merupakan satu-satunya penghubung Gianyar dengan Klungkung. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 1983; 136-137).

Jalur-jalur yang dianggap sebagai pintu masuk menuju wilayah Klungkung yang mungkin akan dilalui oleh serdadu Belanda, ditutup dengan penghalang yang terbuat dari batang-batang bambu atau kayu dan diberi ranjau berkait dan duri-duri (*gebiog*). Dibelakang penghalang dengan jarak rata-rata 150 meter, dibuat benteng (*gelar*) berbentuk tembok dibuat dari tumbukan batu dan tanah liat, serta dilengkapi dengan lubang-lubang pengintai. (Soerabaiasch Handelsblad, 24 April 1908). Setiap benteng dipertahankan oleh laskar antara 50 sampai 150 orang, yang bersenjata tombak,

keris dan beberapa buah bedil. Setiap benteng (*gelar*) dipasang kentongan dari kayu (*kulkul*) sebagai alat komunikasi untuk memberitahu kedatangan musuh. Laskar disusun berlapis-lapis mengikuti sistem perbentengan. (Soerabaiasch Handelsblad, 25 April 1908). Benteng sebelah barat yang banyak membutuhkan sistem perbentengan seperti tersebut diatas, karena Banjarangkan jaraknya paling jauh dari ibukota kerajaan, yaitu kurang lebih 6 km.

3.2. Meletusnya Perang

Tanggal 21 April 1908 Belanda melakukan pemboman dengan meriam dengan menyerang ibukota kerajaan Klungkung. Pemboman dilakukan oleh pasukan marinir Belanda dari atas kapal yang berlabuh di Jumpai. Tembakan meriam diarahkan ke istana Smarapura, Gelgel dan Satria. Tujuannya selain untuk merobohkan tembok-tembok tebal yang melindungi istana, juga untuk menurunkan semangat rakyat untuk berperang melawan Belanda. (De Locomotief, 27 April 1908; Soerabaiasch Handelsblad, 25 April 1908). Hampir selama 6 (enam) hari berturut-turut, ibukota Klungkung diserang meriam oleh pasukan marinir Belanda. Hal ini telah mempengaruhi menurunnya semangat berperang laskar rakyat. Hanya para prajurit kerajaan yang tetap bertempur mempertahankan kerajaan. (De Locomotief, 27 April 1908; Soerabaiasch Handelsblad, 25 April 1908). Ketika ibukota kerajaan diserang meriam, laskar Banjarangkan berusaha menghancurkan jembatan Melangit, untuk mencegah agar pasukan Belanda tidak dapat menyeberang ke Klungkung. (De Locomotief, 27 April

1908; Soerabaiasch Handelsblad, 25 April 1908). Akan tetapi usaha laskar Banjarangkan tidak berhasil.

Untuk menaklukkan kerajaan Klungkung, Gubernur Jendral Van Heutz di Batavia, mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Overste Von Schauroth, yang terdiri dari gabungan pasukan darat dan marinir. Overste Von Schauroth membagi serangan menjadi 3 bagian utama yaitu angkatan darat Belanda di Karangasem bermarkas di desa Lebu dengan kekuatan 110 serdadu. (Soerabaiasch Handelsblad, 29 April 1908). Pasukan Belanda yang mendarat di Kusamba dengan kekuatan serdadu 470 serdadu. (Soerabaiasch Handelsblad, 29 April 1908). Pasukan darat Belanda di Gianyar akan bermarkas di desa Tulikup.

Pecahnya perang terbuka di Gelgel antara laskar Gelgel melawan serdadu Belanda, telah menyebabkan Dewa Agung bersikap dengan jiwa ksatria menghadapi Belanda. Raja mengerahkan laskar kerajaan. (De Locomotief 30 April 1908).

Selasa 28 April 1908, seluruh pasukan Belanda menyerang ibukota kerajaan. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Snepvanger bergerak menuju benteng Satria dan angkatan darat yang dipimpin oleh Carpentier Alting dari Lebu Karangasem bergerak juga menuju Satria. Pertempuran meletus di seluruh desa Satria dan puluhan prajurit Klungkung gugur. Jatuhnya benteng tepian kota ke tangan Belanda, berarti istana telah terkepung. Lebih dari 1.000 prajurit mempertahankan istana. Tanda-tanda akan terjadi perang puputan. Sebagian laskar *pemating* dan *pecalang* (bhayangkara istana), memakai pakaian perang dari kain putih dan dikenakan sebatas lutut serta memakai ikat kepala putih. Para pemimpin laskar juga menggunakan pakaian serba

putih dan peralatan perang bedil, tombak. Hal ini berarti perang puputan mempertahankan kehormatan dan kemerdekaan. (J.J. de Hollander: 1898; 706-708).

Pasukan Belanda mengepung istana dan pusat ibukota. Lebih dari 1.000 prajurit sudah bertekad untuk menghadapi Belanda dengan perang puputan. Bertahan atau menyerang sama saja. Kecil harapan untuk memperoleh kemenangan karena tidak berimbang dalam persenjataan. Sikap *tosning satria mautama, satya salunglung sabyantaka*, yang diambil oleh sebagian besar laskar untuk mempertahankan istana.

Gugurnya Cokorda Gelgel dan Dewa Gde Semarabawa serta para prajurit, disampaikan kepada Dewa Agung. Selanjutnya putra mahkota Dewa Agung Gde Agung mengikuti ibu suri Dewa Agung Muter turun ke medan perang. Laskar yang dipimpin oleh putra mahkota dengan mudah ditembak oleh Belanda yang mengepung istana dari selatan. Putra mahkota, ibu suri dan prajurit gugur dalam perang puputan. Mengetahui hal itu, Dewa Agung Jambe maju ke medan perang sampai titik darah penghabisan. Kekalahan harus dihadapi dengan sikap ksatria sejati. Dewa Agung keluar dari istana Smarapura yang diikuti oleh seluruh keluarga istana, para pembesar kerajaan dan laskar. Mereka semua berpakaian serba putih dengan membawa keris dan tombak bertangkai pendek. Pasukan Belanda menembak dengan gencar. Dewa Agung Jambe, keluarga istana dan para pembesar kerajaan gugur sebagai pahlawan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan kerajaan. (H.H. van Koll: 1914; 206).

Ketika perang puputan Klungkung, di ibukota Klungkung, laskar endehan hampir tidak sempat berperanan. Intimidasi yang dilakukan oleh pasukan Belanda dengan tembakan meriam dari laut, telah menghancurkan tembok-tembok berbentengan

dan rumah-rumah penduduk desa sekitar Klungkung. Ketika pasukan Belanda mulai menyusup dan menyerang desa Gelgel, Tojan, Jelantik, Galiran, Ayung dan Mergan, laskar endehan tidak mampu mempertahankan diri. Hal ini memudahkan pasukan Belanda masuk ibukota kerajaan. Laskar endehan desa-desa di Banjarangkan, berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan pasukan Belanda, yang menyerang Klungkung dari arah Gianyar. Belanda tidak berhasil menembus benteng Banjarangkan. Sehari setelah puputan Klungkung (29 April 1908), Belanda menyerang Banjarangkan dari arah Klungkung. Laskar endehan hampir tidak melakukan perlawanan karena telah mengetahui raja, pembesar kerajaan beserta keluarga istana telah gugur dalam perang puputan. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 1983; 127-128).

Pertempuran 28 April 1908, pihak Belanda memperkirakan laskar Klungkung memiliki kekuatan persenjataan, yang terdiri atas 200 pucuk bedil, 4 pucuk senapan tembak ulang (repetier), 4 buah meriam dan lebih dari 1.000 batang tombak bertangkai pendek dan panjang. Menurut laporan yang diberitakan oleh beberapa surat kabar, bahwa pada waktu itu Belanda telah merampas 568 pucuk bedil, 4 buah meriam di Klungkung. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 128-129).

3.3. Akhir Peperangan.

Klungkung jatuh ketangan kolonialisme Belanda, dengan gugurnya raja Klungkung bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga istana, para pembesar kerajaan serta lebih dari 1.000 prajurit. Perang berlangsung hampir 4 jam disekitar kraton kerajaan dan berakhir menjelang sore. Surat kabar Belanda memberitakan bahwa

dipihak kerajaan Klungkung yang gugur sebanyak 108 orang anggota keluarga, termasuk wanita dan anak-anak. Ada kurang lebih 80 orang yang luka-luka melapor ke dinas kesehatan Belanda. Diantara yang gugur dalam perang yaitu Dewa Agung Jambe (raja), Dewa Agung Smarabawa (bupati saudara raja), Dewa Agung Gde Agung (putra mahkota). Diantara yang luka-luka antara lain: Cokorda Raka Jodog, Cokorda Gde (sepupu raja), Cokorda Geg (keponakan raja), Anak Agung Gde Oka. Belanda tidak mengetahui bahwa Dewa Agung Gde Agung adalah putra mahkota yang berumur 12 tahun, yang bertempur bersama ibunya. Putra mahkota ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa puputan merupakan nilai heroisme yang relegius. Selain itu menunjukkan bahwa orang-orang Bali mempertahankan kemerdekaan dan harga diri lebih tinggi nilainya dari sebuah kehidupan duniawi. Berdasarkan surat keputusan Gubernemen Hindia Belanda tertanggal 8 Juli 1923, pemerintah kolonial Belanda melantik Cokorda Geg (putra Dewa Agung Smarabawa) menjadi wakil Belanda di Klungkung, menjadi zelfbestuur. Cokorde Geg diberi gelar Ida I Dewa Agung Negara Klungkung. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 146-149).

Paulus mencatat dalam ensiklopedi, kekaguman tentang perang puputan. Raja beserta keluarga dan para bangsawan bersenjatakan tombak dan keris dengan keyakinan menyambut musuh dan memilih mati sebagai kewibawaan seorang raja. Dengan mati, menghadapi suatu kehidupan yang mulia di sorga. (J. Paulus:1917;112). Dengan jatuhnya Klungkung ke tangan Belanda, maka Bali berada dibawah kolonialisme Belanda.

Istilah “puputan” itu diperkenalkan lebih banyak oleh koran Belanda dengan istilah “de poepoetan.” (*de Locomotief*: 1908; 1-2, alenia 6; H. Fisscher: 1908; 256; J.E. De Meyier: 1908; 64). Sumber lokal hampir semuanya menyuratkan perang dengan istilah “*matelasan*” atau “*diastu teka ring wasianti*” yang menggambarkan semangat untuk berperang melawan Belanda dan sanggup bertempur sampai mati. (Wipra Nguraha; 37a bait 2). “*Puput*” artinya selesai dan *matelasan* artinya sampai habis atau habis-habisan. Keduanya menggambarkan jiwa kesatria dan pantang menyerah untuk dijadikan jarahan oleh musuh.

Puputan bukan suatu taktik perang putus asa. Puputan merupakan suatu penyelesaian perang membela kemerdekaan dan kebenaran dari ancaman asing. Kekalahan tidak dengan penyerahan, tetapi semangat perang dan ajaran suci yang diajarkan agama Hindu, yaitu *matelasan nindihin dharma*. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 1983; 146).

Dalam perlawanan perang, turut memegang peranan penting yaitu sistem kepercayaan yang sangat dipengaruhi agama Hindu. Meletusnya puputan disejajarkan dengan suasana jaman kali (kaliyuga). Kepercayaan seperti ini muncul karena tekanan penjajahan Belanda. Para pengikut berperang dan puputan dengan didasari ide membela tumpah darah, membela raja dan kerajaan, membela kebenaran. Ide ini merupakan pencerminan pengaruh Hindu, yang memberikan ajaran-ajaran yang menjadi pegangan bagi setiap ksatria. Tujuan perlawanan tidak hanya untuk mengusir penjajah dari batas-batas wilayah kerajaan Klungkung, tetapi juga munculnya unsur-unsur perlawanan yang bersifat surgawi. Bagi pelaku-pelaku dipihak kerajaan, melakukan perang dan puputan

dianggap sebagai salah satu jalan menuju kesempurnaan hidup di dunia lain. Mati dalam perang dan puputan, pahalanya mendapat surga. Perang dan puputan dianggap suci. Mereka memakai pakaian serba putih menunjukkan susasana kesucian. Pakaian serba putih bukan berarti tanda penyerahan diri kepada pasukan Belanda, tetapi sebagai lambang perlawanan yang khas pada waktu itu. Kesetiaan para kaula dan sisya kepada kelompok pemimpin, tidaklah didasarkan atas adanya satu klen tetapi didasarkan atas otoritas yang dijemakan di dalam pribadi Dewa Agung dan para pembesar kerajaan sebagai kelompok elit. Tampak ada hubungan timbal balik antara kawula gusti atau sisya surya. (Ida Bagus Sidemen, (dkk): 1983; 156).

Kerajaan Klungkung adalah kerajaan terakhir di Bali yang melakukan perlawanan atas dominasi Belanda di Bali. Sejak 28 April 1908, seluruh Bali dapat dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Puputan Klungkung merupakan salah satu bentuk perlawanan menentang dominasi Belanda.

BAB IV

NILAI-NILAI PERJUANGAN PERANG PUPUTAN

Hari Puputan Klungkung merupakan momen bersejarah dan momen terpenting bagi rakyat Klungkung, termasuk juga bagi Indonesia. Pasalnya, kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjalanan panjang dan perjuangan yang keras dari para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Klungkung untuk memperingati hari Puputan Klungkung, mulai dari upacara pengibaran bendera merah putih, sendratari, karnaval budaya, hingga perlombaan tradisional .

Namun perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan seharusnya tidak hanya diperingati setahun sekali dengan perayaan-perayaan tertentu. Perjuangan tersebut harus dimaknai dan dilanjutkan oleh generasi muda dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah melalui perjuangan para pahlawan yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya.

Istilah Perang Puputan dipakai karena peperangan tersebut dilakukan sampai pada titik darah penghabisan. Kata puputan sendiri mengandung makna moral, karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya.

Intervensi Belanda juga terjadi pada tahun 1908 yang sekaligus menjadi intervensi militer Belanda ke tujuh di Pulau Bali. Intervensi ini mengakibatkan kerajaan

Bali porak poranda karena adanya monopoli opium dari pihak Belanda. Beberapa kerajaan seperti Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Karangasem termasuk ke dalam Kerajaan yang menjadi rusuh akibat intervensi Belanda ini. Belanda menghabisi Kota Klungkung.

Raja Klungkung dan para pasukan istana berdiri melawan Belanda dengan menggunakan keris, tombak dan meriam. Namun pada bulan Oktober 1908, diadakan persetujuan antara pihak Belanda dan juga Raja Bangli untuk menjadikan Klungkung seperti Gianyar dan Karangasem sebagai protektoral Belanda.

Peristiwa heroik-tragik Puputan Klungkung selalu dikenang oleh masyarakat Bumi Serobotan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan yang juga dirangkaian perayaan hari jadi ke-23 Kota Semarapura itu dikemas dalam sebuah hajatan bertajuk festival. Namanya, Festival Smarapura. Karena ini kegiatan mengenang sebuah peristiwa patriotik, tentu saja spirit perjuangan membela Tanah Air tetap dikumandangkan. Bagaimana detik-detik peristiwa yang menjadi tonggak jatuhnya Bali ke tangan Belanda.

Catatan Belanda maupun penulis tradisional Bali mengenai perang Puputan Klungkung tidak sebanyak perang Puputan Badung. Hal ini boleh jadi dikarenakan begitu singkatnya perang Puputan Klungkung. Hanya dalam satu hari serangan terorganisir Belanda, Klungkung sudah dinyatakan jatuh ke tangan Belanda

4.1 Nilai Patriotik

Perjuangan fisik mempertahankan Klungkung pada tahun 1908 oleh masyarakat Klungkung selalu diperingati dengan berbagai kegiatan. Peristiwa bersejarah tersebut

selalu terpatri di hati setiap insan rakyat Klungkung di Pulau Dewata pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Sebagai generasi muda, seluruh masyarakat Bali sebagai generasi muda penerus bangsa diharapkan untuk memantapkan nilai-nilai nasionalisme sebagai wujud rasa hormat dan bakti kepada jasa-jasa para pahlawan. Sikap rela berkorban hendaknya mampu diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari dan meneruskan perjuangan pahlawan yang lalu. Untuk generasi muda diharapkan mampu mewarisi semangat kepahlawanan, agar mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu semangat patriotisme, cinta tanah air, heroism, rela berkorban, kesetiakawanan dilaksanakan dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini yang tercermin dalam kegiatan generasi muda Klungkung yang tergabung dalam Sanggar Kayonan yang diprakarsai oleh I Dewa Gede Alit Saputra. Bapak Dewa mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam fragmen tari. Ketika memerankan adegan dari perang puputan, mereka dapat merasakan apa yang terjadi pada masa itu yaitu rasa patriotik dan heroik. Para pemeran yang terlibat dalam fragmen tari, terutama lascar pejuang, turut merasakan perjuangan dalam mengusir penjajah. Perasaan sedih ketika raja wafat. Ketika ada anggota sanggar yang memerankan sebagai dayang, mereka merasakan keagungan puri. Para generasi muda mempelajari sejarah tidak hanya dengan membaca buku sejarah tetapi juga melalui pentas seni pertunjukkan. Melalui pentas seni, para pemain lebih mengetahui jalannya perang

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat Klungkung antara lain Upacara Bendera di Lapangan Puputan Klungkung sebagai wujud penghormatan dan

penghargaan terhadap pahlawan, dimana pejuang terdahulu dengan penuh keberanian dan semangat rela berkorban mempertahankan Klungkung dari tangan penjajah Belanda

Apa yang terjadi dalam perang Puputan Klungkung, latar belakang, sebab, tujuan dan proses terjadinya perang tersebut menyimpan banyak makna, membantu kita memahami karakter budaya dan juga banyak nilai yang dapat kita pelajari sekarang ini. Nilai nilai tersebut masih terus dilestarikan hingga saat ini.

Perang Puputan memiliki nilai- nilai kesetiaan dan kepercayaan tinggi dari warga atau rakyat kerajaan terhadap rajanya. Hal ini karena perintah 'puputan' atau perang penghabisan adalah dari sang Raja kepada rakyatnya. Namun demikian, sang raja tidak memaksa seluruh rakyatnya untuk melaksanakan puputan ketika situasi sudah seperti tidak ada harapan lagi. Dikatakan bahwa rakyat yang mau setia membela kebenaran sajalah yang dipersilahkan melakukan puputan.

Dalam keadaan kritis di medan peperangan, serangan dari pihak Kolonial Belanda tidak menggetarkan semangat yang ada di hati para rakyat Bali untuk membela rajanya. Terjadinya perang puputan merupakan salah satunya bukti bahwa pembelaan kebenaran dilakukan secara habis-habisan dan penuh semangat.

Diceritakan bahwa rakyat Klungkung bersama keluarganya mengikuti raja melakukan peperangan. Sebelum terjadinya Puputan Klungkung pada 16 April 1908 kerajaan Klungkung berhasil membunuh 10 serdadu kolonial termasuk salah satu pimpinannya Letnan Haremarker. Masyarakat Klungkung baik laki-laki maupun perempuan semua turun ke jalan mengenakan pakaian adat berwarna putih yang

diyakini dapat mengantarkan jiwa-jiwa yang tenang menuju alam nirwana serta mereka yakin ketika hendak menunaikan *dharmaning* ksatria harus mengikuti aturan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya. Mereka melawan kolonial Belanda, membawa keris, meriam dan tombak, siap untuk melawan Belanda. Sang raja mengingatkan akan pentingnya membela kebenaran, menjunjung tinggi nilai kesatria yang penuh dengan budi dan karakter selayaknya seorang raja.

Dalam perang puputan ada nilai kerja keras mencapai cita-cita. Nilai kerja keras mencapai cita-cita digambarkan oleh sikap saling tolong menolong. Kerja keras untuk memenangkan peperangan melawan kolonial Belanda yang menelan kurang lebih 1000 orang korban jiwa.(Ida Bagus Sidemen,(dkk) :147)

Perjuangan kerja keras mencapai cita-cita yang dilakukan oleh rakyat Klungkung sungguh sangat tidak mudah diimplementasikan. Nilai kerja keras untuk mencapai cita-cita terutama dalam kondisi kritis peperangan sangat perlu diapresiasi sebagai bentuk karakter dan budaya rakyat Klungkung sebagai salah satu anggota kerajaan Bali.

Pengorbanan dengan tulus membela kebenaran tidak mungkin dapat tercapai apabila tidak ada kebersihan pikiran dan kejernihan budi pekerti. Pengorbanan harus dilakukan sebagai pembuktian kecintaan rakyat dan raja terhadap kerajaan Klungkung. Raja Klungkung yang memerintahkan terjadinya perang Puputan adalah Dewa Agung Jambe II. Rakyat bersama dengan keluarga kerajaan berkorban untuk menghormati raja yang sangat mereka cintai dan hormati. Dalam keyakinan agama Hindu, pengorbanan

membela kebenaran hingga kematian merupakan hal yang sangat terhormat. Hal ini juga yang menjadi faktor pendorong bagi rakyat untuk terus maju tak gentar.

Nilai yang terkandung dalam perang puputan sebenarnya masih banyak, namun pada akhirnya karakter dan kebudayaan bangsa yang kuat menjadi salah satu nilai yang paling berharga dari suatu kejadian. Kesetiaan, keberanian untuk membela kebenaran, pengorbanan dan kebijaksanaan seorang Raja akan terlihat ketika sedang berada di situasi krisis yang mengancam nyawanya. Nilai dalam perang Puputan Klungkung juga mengenai ketangguhan untuk terus berjuang hingga kematian daripada harus menyerah di bawah kekuasaan musuh. Semangat, kerja keras dan kerja sama merupakan pemahaman yang sangat mudah dalam teori namun aplikasinya sangat sulit diterapkan. Latar belakang perang Puputan di Bali dapat dipelajari secara mendalam, mengenai intervensi Belanda dan juga strateginya dalam peperangan tersebut. Intervensi yang dilakukan oleh Belanda juga merupakan salah satu penyebab Perang Aceh dan Perang Banjar. Pihak Hindia Belanda mengintervensi beberapa wilayah Indonesia mulai dari Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa hingga Bali. Intervensi yang dilakukan oleh pihak Kolonial Belanda memiliki satu kesamaan yaitu dengan ikut campur dalam kekuatan, kewenangan dan juga politik kerajaan yang berkuasa. Dengan adanya perang ini banyak rakyat Indonesia yang harus tewas demi membela kemerdekaan negara dan para pejuang yang tewas memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Proses terjadinya interaksi sosial pada saat itu tak berjalan dengan baik dan peperangan terjadi sangat besar. Semua kerja keras yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus dibayar dengan nyawa dan salah satu orang yang melakukan pertempuran adalah Dewa Agung Jembe

II. Dengan perjuangan yang gigih serta pantang menyerah membuat Belanda sedikit kewalahan, walaupun ujungnya Belanda tetap menang dengan mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia.

Perang Puputan Klungkung mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia, karena banyak kerusakan yang terjadi di area perang dan banyak sektor-sektor yang terhenti. Salah satunya sektor ekonomi masyarakat yang tak berjalan dan aktivitas sosial pun terhenti, karena syarat terjadinya aktivitas sosial adalah adanya interaksi yang terjadi antar masyarakat. Bidang komunikasi pun banyak terhenti dengan adanya perang ini, karena komunikasi yang baik antar masyarakat akan menjadikan sebuah kekuatan yang besar dan salah satu tujuan komunikasi sosial adalah untuk membuat strategi untuk mencapai kemerdekaan.

Dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Dewa Agung Jambe II di Bali menjadikan salah satu pelopor pejuang kemerdekaan Indonesia dan perjuangan ini banyak ditiru oleh masyarakat dari daerah lain. Semangat kemerdekaan tertular pada masyarakat lainnya dan banyak interaksi yang terjadi, karena salah satu syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi yang berjalan dengan baik.

Ada istilah umum yang mengatakan bahwa “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya.” Seperti kata Bung Karno yang juga mengatakan “Negara yang besar adalah yang tidak melupakan jas merah,” artinya tidak akan melupakan sejarah suatu bangsa tersebut. Para pahlawan yang rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan negara Indonesia.

Kita memang tidak ikut serta dalam perjuangan yang mengorbankan ribuan nyawa di Klungkung pada waktu itu. Namun kita, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa sudah sepatutnya memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai perkembangan zaman. Jadilah pahlawan dengan meniru semangat juang para pahlawan kita yang telah gugur dengan berkontribusi terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Bangsa ini membutuhkan banyak pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Jadilah pahlawan dalam segala bidang kehidupan.

Hari Puputan Klungkung dirayakan setiap tanggal 28 April tapi jadilah pahlawan setiap harinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pahlawan yang dimulai untuk diri sendiri dan keluarga dengan mencetak prestasi hingga akhirnya menjadi pahlawan bagi negeri ini. Jangan jadikan Hari Puputan ini sebagai unsur seremoni belaka tanpa menghayati nilai-nilai perjuangan dari pahlawan kita. Sebagai generasi muda sudah saatnya mengambil nilai-nilai tersebut yang direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk membentuk Indonesia sebagai negara yang damai, adil, sejahtera dan tentunya jujur. Tapi sudahkah Indonesia menjadi negeri yang jujur sementara kasus korupsi semakin merajalela di bumi pertiwi? Sebagai generasi muda, menjadi bangsa pemberantas korupsi adalah yang dibutuhkan. Jangan menjadi seseorang yang justru melakukan tindakan yang merugikan negara tersebut. Jadilah bangsa yang pemberani dan tegas melawan segala ketidakjujuran demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Melihat kondisi generasi muda saat ini, rasanya jauh sekali jika dikatakan sudah menerapkan nilai juang dari para pahlawan. Para pahlawan saling bekerja sama

mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan pun dilakukan. Banyak generasi muda saat ini yang bersikap apatis, bersikap acuh yang tingkat kepedulian terhadap sesama dan masalah dalam negeri sangat tipis. Padahal, tugas generasi muda memiliki tugas lainnya, memang bukan lagi melawan para penjajah, tetapi bertempur dengan segala ketertinggalan seperti kebodohan dan kemiskinan dalam negeri.

Di era dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, semakin membuat peran generasi muda sebagai agen perubahan kurang menonjol. Banyak yang menyalahgunakan teknologi digital ini dengan melakukan perbuatan yang sebetulnya tidak perlu. Perilaku konsumtif, aktivitas di dunia maya semakin membuat mereka terlena di dunia yang serba instan saat ini.

Belum lagi masalah tawuran antar pemuda, narkoba di kalangan remaja, dan perilaku seks bebas yang terus meningkat, merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Semakin jauh generasi muda dari kegiatan yang produktif dan positif, semakin jauh juga jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang makmur karena sang pembaharu masa depan yang masih belum memahami peran mereka sesungguhnya.

Generasi muda sudah seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang harus selalu maju ke depan karena masa depan bangsa ada ditangan anak-anak muda. Penting untuk memiliki sikap kepemimpinan dengan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan, dan politik sebagai representasi wajah baru bangsa Indonesia.

4.2 Nilai Ksatriya (*Dharmaning Ksatriya Mahottama*)

Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai keberhasilan merupakan nilai yang dimaknai oleh masyarakat Klungkung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitupula bagi generasi muda Klungkung nilai-nilai tersebut diimplemetasikan pada masa kini sebagai siswa antara lain yaitu bekerja keras dengan menggunakan akal pikiran, belajar ilmu pengetahuan agar menjadi orang sukses. Sebagai komunitas masyarakat yaitu terlibat dalam sekeha teruna teruni, salah satunya dalam pemeliharaan pura. Nilai-nilai yang dapat dipetik yaitu nilai gotong royong atau nilai kebersamaan. Hal ini sesuai dengan motto Kabupaten Klungkung yaitu “Darmaning Ksatriya Mahottama” yang artinya “Kewajiban seseorang berjiwa ksatria sungguh mulia. Satria dimaknai oleh generasi muda masa kini yaitu berani membela kebenaran, keadilan, membela Negara dengan mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan.

Perang fisik yang dilakukan oleh pahlawan bangsa dalam melawan kolonialisme Belanda, oleh generasi muda perang masa kini dimaknai tidak dengan perang fisik tetapi perang melawan Narkoba, perang menghadapi hoaks, perang melawan radikalisme serta perang melawan pergaulan bebas. Cara yang dilakukan untuk menangkal perang dengan narkoba dan radikalisme, antara lain dengan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak sekolah maupun pemerintah daerah; mengikuti kegiatan olah raga; terlibat dalam organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah; mempertahankan tradisi; mengikuti kegiatan kesenian (salah satunya dengan masuk menjadi anggota sanggar seni); memilah-milah teman bergaul. Tentunya hal ini kembali tergantung pada diri sendiri. Peran orang tua turut memegang peranan dalam

menangkal hal-hal negatif. Menurut mereka, perang dengan bangsa sendiri cukup sulit dalam arti ada yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa daripada perang dengan penjajah atau bangsa lain. Kehidupan lingkungan turut berperan baik lingkungan sekolah maupun tempat tinggal dan keluarga

4.3 Nilai-Nilai Bela Negara Kerajaan

Ketika massa rakyat bergabung untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa, karena ikatan utama mereka yang tumbuh atas kesadaran berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air yang satu Indonesia, maka sesungguhnya bela Negara telah menjadi keniscayaan. Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang memerlukan investasi mental demikian, sesungguhnya di lingkungan dunia internasionalpun, suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan suatu perjuangan seluruh anak bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan sekarang adalah terletak pada lemahnya komitmen pada nilai-nilai dasar, yang berujung pada tiga masalah pokok bangsa, 1, merosotnya wibawa Negara, 2, melemahnya segi perekonomian Negara, 3, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita

cenderung menerapkan prinsip-prinsip liberalisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia, dan hal tersebut juga menjadi pintu masuk kesalahan. Oleh karenanya, sudah saatnya kita melakukan koreksi, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi. Dalam pokok bahasan bela Negara dan identitas nasional adalah melalui revolusi mental.

Penggunaan istilah revolusi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tidak berlebihan sebab Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan. Dalam melaksanakan revolusi mental, Presiden menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963: Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian secara kebudayaan. Revolusi mental bung Karno dinarasikan : “Revolusi Mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala” yang kemudian diadopsi dalam program Revolusi Mental Presiden Joko Widodo yaitu, untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.

Bela Negara merupakan salah satu alat untuk mempererat dan memperkokoh kecintaan terhadap suatu negara khususnya untuk negara Indonesia. Sangat penting bela negara ditanamkan dalam diri dan jiwa setiap warga negara Indonesia. Apalagi untuk

para generasi muda yang memiliki banyak waktu untuk mewujudkan Negara Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera.

Akan tetapi melihat dinamika yang terjadi pada zaman modern, Bela Negara terhadap tanah air mulai rapuh. Generasi muda bangsa mulai melupakan apa itu bela negara dan mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya seperti berfoya-foya dan menggunakan narkoba. Banyaknya pengaruh budaya barat yang telah merusak pemikiran-pemikiran anak muda Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan suatu krisis multidimensi. Krisis multidimensi ini dapat menimbulkan suatu peluang munculnya disintegrasi bangsa. Tidak bisa dipungkiri lagi karena disintegrasi telah ada dan terjadi di beberapa bagian di wilayah Indonesia.

Disintegrasi yang terjadi terus menerus akan menjadi suatu ancaman yang sangat serius bagi Indonesia. Hal ini akan berbahaya terhadap kelangsungan NKRI dalam mewujudkan tujuan Nasional. Untuk mencegah terjadinya disintegrasi yang terus menerus harus dilakukan suatu tindakan yang kongkrit. Bagaimana untuk mewujudkannya?

Salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan tekad warga negara adalah dengan melaksanakan sosialisasi bela negara dan mengaplikasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari mulai dari diri sendiri. Bela negara menjadi tanggungjawab semua warga negara Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang berisi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara.

Bela Negara bisa juga disebut sebagai suatu gerakan moral. Dalam bela negara dapat dilakukan mulai dari lingkungan yang kecil sampai lingkup Nasional. lingkungan

kecil tersebut dimulai dari lingkup keluarga yaitu lingkup yang paling kecil dalam kehidupan sehari-hari.

- Lingkungan Keluarga

Sebagai suatu keluarga yang sudah memiliki peran masing-masing dapat melakukan Bela Negara dengan melakukan dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu keluarga tersebut sudah melaksanakan Bela Negara dengan baik.

- Lingkungan Masyarakat

Kemudian diwujudkan dalam lingkungan yang lebih luas yaitu dalam lingkup nasional. Sebagai anggota masyarakat dalam melakukan bela negara dapat diwujudkan dengan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, mengetahui dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing.

- Lingkungan Nasional

Setiap warga negara harus mampu membentuk dan mengembangkan kehidupannya dalam masyarakat Indonesia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, rukun bersatu, cinta tanah air yang berkualitas maju dan sejahtera selaras, serasi dan seimbang serta mempunyai daya tangkal terhadap penetrasi budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Dengan melaksanakan Bela Negara seperti hal di atas yang dimulai dari lingkup yang paling kecil sampai ke lingkup yang lebih luas diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Contoh-Contoh Bela Negara bagi generasi pelajar adalah melestarikan budaya belajar dengan rajin bagi para pelajar taat akan hukum dan aturan-aturan Negara.

Dari unsur yang ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara. Beberapa contoh tersebut diantaranya adalah : Kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar. Sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Meninggalkan korupsi. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan.

Rasa Patriotik harus diterapkan sedini mungkin kepada generasi muda penerus bangsa. semangat nasionalisme generasi muda sangat penting keberadaannya. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap tanah air tercinta dengan tetap menghargai dan menghormati bangsa-bangsa lain di dunia ini juga harus ditumbuhkan. Sesama bangsa harus saling membantu dan bertenggang rasa. Karena dengan hal-hal tersebut bersama kita bisa memelihara perdamaian di dunia ini. Jika perdamaian di dunia dapat dipelihara

maka ketentraman rakyat akan terjamin. Karena nasionalisme membentuk kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara tanpa memandang dari suku, ras, agama dan kelompok kita berasal. Dengan semangat nasionalisme tersebut, rasa rukun antar masyarakat juga akan tumbuh. Sehingga tidak akan ada pertempuran dan peperangan antar masyarakat dalam sebuah negara.

Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila dan sikap Bela Negara. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Pancasila harus dijadikan cara hidup (*way of life*) seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dengan tampilan kaku, tetapi yang terpenting ialah hakikatnya tetap terpelihara dan diamalkan.

Dalam melaksanakan langkah-langkah itu, diperlukan sinergisme lintas kelembagaan, untuk bersama-sama mengaktualisasikan Pancasila melalui sistem dan dinamika kekinian. Kampus memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial sehingga tidak ada indikasi perkembangan paham lain.

Generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kampus sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Arah perjalanan bangsa ini berada di tangan generasi milenial, generasi muda yang saat ini tengah membaca tulisan ini, yang akan menerima tongkat estafet pembangunan. Mari jaga, rawat dan peliharalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Aspek prosedural dan struktural sejarah, skop spasial dan temporal sejarah perang Puputan Klungkung telah dideskripsikan. Menceritakan kembali atau rekonstruksi historis peristiwa perang Puputan Klungkung tahun 1908, 111 tahun yang lalu adalah obyek kajian sejarawan. Sebab rekonstruksi historis disusun berdasarkan bukti-bukti historis juga. Peristiwa perangnya sendiri yang hanya sekali terjadi dan tidak bisa terulang bersifat obyektif. Namun ketika mendapat sentuhan sejarawan untuk menceritakan kembali peristiwa perang yang tidak bisa diulang itu maka aspek-aspek subyektif telah ikut melekat pada produk historiografinya. Secara metodologis obyektivitas dan subyektivitas dapat dibenarkan dalam etika keilmuan dari disiplin ilmu sejarah. Lebih dari itu aspek subyektif memberi keleluasaan bagi sejarawan untuk memberi interpretasi dan penilaian serta memaknai fenomena perang dari perspektif dan konteks zamannya yaitu masa kini.

Rekonstruksi peristiwa Perang Puputan Klungkung tidak bisa dilepaskan dari peranan aktornya, pimpinan dan ideologi "Puputan" dalam Hinduisme yang menggerakkan raja, pembesar kerajaan dan pengikutnya untuk melancarkan perlawanan. Memaknai kiprah sepak terjang aktor peristiwa Ida Dewa Agung Jambe juga bergelar Ida Dewa Agung Putra IV, Raja Klungkung XI di keratin Smarapura (sekarang bekas-bekasnya masih tersisa : *Gapura Utama, Pemedal Agung, Bale*

Kambang, Kertha Gosa) sebagai raja pejuang dari Klungkung Bali adalah kewajaran historis. Ia ditampilkan dan dianalisis dalam historiografi, bahkan dilestarikan dalam bentuk historama pengisi diorama di Museum Bajra Sandhi, Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Didalam historiografi Perang Puputan Klungkung tampak pergumulan aktor dengan lingkungan diri, hidup dan perjuangan dialognya dalam konteks sejarah Bali dan sejarah Indonesia. Dinamika perjuangan Ida Dewa Agung Jambe aktor pemimpin perang Puputan Klungkung adalah pejuang raja dan pengikutnya melawan dominasi kekuasaan kolonial Belanda pada dekade pertama abad ke-20. Kondisi ini semakin jelas jika dibandingkan dengan bentuk perjuangan aktor-aktor raja dan sultan yang lain di Nusantara. Sampai dekade abad ke-20, dalam sejarah Indonesia berdasarkan visi Indonesiasentris ternyata di kerajaan Klungkung - Bali masih mengalami gejoak dan dinamika intern dalam bentuk perang melawan kekuasaan kolonialisme Belanda (Sutjipto, 1975). Perang perlawanan yang terjadi baik berskala besar maupun yang berskala kecil pada lapisan atas atau gerakan social petani pada lapisan bawah masyarakat. Ciri-ciri demikian dapat dikatakan menjadi bukti dinamika intern masyarakat yang terjajah dengan sifat-sifat yang reaktif dan selektif terhadap anasir asing yang datang dari luar (Kartodirdjo, 1984).

Nilai patriotik heroism yang melekat pada sosok Raja Klungkung Bali, Ida Dewa Agung Jambe bukan ditentukan oleh kekalahan atas dirinya tetapi pada perjuangannya mempertahankan harkat dirinya dan negara kerajaannya (*bela negara, nindihin gumi dan dharma agama*). Penggalan dan penemuan nilai moral dari peristiwa kekalahan melawan nasib adalah kecenderungan yang universal. Sebab dari peristiwa

perang inilah harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dapat diformulasikan dan dirumuskan. Pangeran Diponegoro kalah dalam Perang Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol kalah dalam Perang Paderi (1821-1837), Ida Dewa Agung Istri Kanya kalah dalam perang Kusamba (1849). Demikian pula Ida Dewa Agung Jambe kalah dalam perang Puputan Klungkung (28 April 1908), justru pada kekalahan, hikmah ditemukan. Oleh karena itu, tepat dikatakan bahwa sejarah tidak selalu sesuatu yang diingat tetapi bisa pula sesuatu yang ditemukan. Dengan kalimat lain, peristiwanya diingat tetapi maknanya ditemukan. Sesungguhnya benar dan tetap aktual bunyi pepatah “ manusia mati meninggalkan nama”.

Nama Ida Dewa Agung Jambe (1906-1908) sebagai raja Klungkung berdaulat terakhir adalah raja pejuang perang puputan melawan kolonialisme Belanda meninggalkan ciri-ciri patriotic heroik membela negerinya (*dharma agama, nindihin gumi*) atas dasar keyakinan ideologi Hinduisme (*dharma agama*), ksatria sejati dan muia (*dharmaning kstatrya mahotama*), pantang menyerah sampai titik darah penghabisan, percaya dan takwa kepada Sanghyang Widhi Wasa, bakti pada leluhur. Ciri-ciri yang ditinggalkan sangat bermakna bagi generasi sekarang, generasi penerus yang menjadi actor dalam perjuangan rakyat Bali ikut berjuang bekerja keras untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dalam sejarah perjuangannya bangsa Indonesia.

6.2 Saran

Mengungkap segi-segi ideologis dan nilai-nilai moral dari puputan Klungkung dapat dianggap sebagai modal pembangunan daerah kabupaten dan provinsi Bali di bidang mental dan spiritual. Lebih dari itu, menjadi bentuk kepribadian dalam konteks yang lebih luas yaitu salah satu unsur pembentuk kepribadian bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang mental spiritual menjadi spirit fondasi pembangunan fisik material. Keseimbangan pembangunan mental spiritual dan bidang fisik material sesuai dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan penggalian dan menemukan mana dari historiografi perang Puputan Klungkung diharapkan dapat memberi dimensi baru kepada historiografi Indonesia yang Indonesiasentris. Ideologi “Puputan” yang dikaitkan dengan sifat-sifat reaktif, selektif, dinamik merespon nilai-nilai yang datang dari luar menjadispirit etos kerja pejuang yang tidak pernah menyerah. Sekaligus pemberi inspirasi generasi sekarang, generasi penerus untuk membangun daerah, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi penerus yang dijiwai nilai – nilai kearifan lokal seperti semangat puputan dalam bingkai ideologi bangsa Indonesia seyogyanya berpartisipasi aktif melalui daerahnya masing-masing.

Selain bentuk diorama, peristiwa heroic historis seperti Puputan Klungkung dapat disosialisasikan melalui bentuk-bentuk pentas seni, lawatan sejarah ke situs-situs bersejarah, kehadiran sanggar-sanggar seni dapat diharapkan ikut berpartisipasi untuk sosialisasi lewat pentas seni yang memakai tema-tema dari peristiwa bersejarah.